



# **LAPORAN AKHIR**

## **PENELITIAN PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Usulan : Penelitian Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. F. A. Abby, S.H., M.H.
- b. Jabatan Struktural : Pembina/IVa
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
- e. Alamat Surat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin - 70123
- f. Telpon : 0511-3305648
- g. E-mail : abby57bjb@gmail.com

3. Anggota Peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1.	Dr. H. Hairudin Noor, S.Sos., MM	Ilmu Pemerintahan	Universitas Lambung Mangkurat
2.	Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat
3.	Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat

4. Sumber Dana : Dana APBD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

5. Biaya Penelitian : Rp. 75.000.000,00

Banjarmasin, Desember 2017

Mengetahui,  
A.n. Ketua LPPM Unlam,  
Sekretaris,

Ketua Peneliti,

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19761109 200604 1 003

Dr. F. A. Abby, S.H., M.H.  
NIP. 19570524 198703 1 002

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teoritik .....	8
B. Landasan Operasional .....	28
<b>BAB III PROFIL WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Letak Geografis.....	32
B. Demografi .....	35
C. Kondisi Ekonomi .....	37
D. Pendidikan .....	44
E. Kesehatan.....	48
F. Agama .....	52
G. Kriminalitas .....	55
H. Kemiskinan .....	60
I. Infrastruktur.....	65
<b>BAB IV DAERAH RAWAN KONFLIK .....</b>	<b>67</b>
A. Fakta dan Faktor Penyebab Konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	67
B. Dampak Konflik.....	84
C. Deskripsi Wilayah Rawan dan Berpotensi Konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan .....	94
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblurn, 2003: 294). Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Dewasa ini konflik seringkali terjadi di berbagai elemen masyarakat. Hal demikian dikarenakan berbagai latar belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi. Pada akhir- akhir ini konflik sering kali muncul di berbagai kehidupan di sekitar kita. Konflik yang muncul dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antara kelompok tertentu dan membuat ketidak stabilan di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang berkonflik. Konflik bisa muncul

pada skala yang berbeda seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*), setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Pada catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk-bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian (Novri Susan; 2010: 9).

Konflik sering terdengar dan dimuat dalam media cetak maupun media elektronik. Konflik yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang muncul dikalangan masyarakat. Konflik banyak terjadi di berbagai daerah yang menghiasi media cetak dan elektronik. Berbagai konflik tersebut sudah ada yang mendapatkan penyelesaiannya dan banyak konflik yang terjadi yang belum menemui titik temu atau penyelesaian dari konflik tersebut.

Jadi Konflik sosial adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih disaat pihak yang satu berusaha menyingkarkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang sampai terjadinya konflik ialah disaat terjadi perbedaan yang sulit untuk ditemukan persamaannya/didamaikan/diselesaikan baik itu perbedaan kepandaian, ciri fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat.

Konflik Sosial berfungsi sebagai faktor positif yang berdampak membangun (konstruktif) dan faktor negatif yang merusak (destruktif) untuk kedamaian. Konflik sosial destruktif secara positif adalah sebagai pendorong berkembangnya modal kedamaian sosial sehingga meningkatkan solidaritas antar kelompok. Sedangkan konflik sosial destruktif adalah juga dapat menjaga keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dan skala yang lebih luas, namun jika melampaui batas toleransi dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dengan tidak dicarikan solusi yang cepat maka hal tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial.

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi antara dua kelompok yang berbeda, interaksi tersebut bersifat persaingan, pengancaman, perusakan, percekocokan, atau perkelahian bahkan akan menjadi penyebab tawuran. Konflik sosial sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam, mulai dari suku, agama, dan ras. Keragaman penduduk tersebut tidak selamanya mampu selaras dalam melakukan hubungan sosial. Jika antara suku/agama/ras berbeda pendapat dan tidak mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan lapang dada, maka sering kali akan diikuti dengan perselisihan hingga berujung pada konflik sosial.

Dampak negatif merupakan dampak yang tidak mungkin terelakkan. Konflik dalam jenis apapun pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap kehidupan orang-orang yang berkonflik. Dampak negatif tersebut meliputi:

*Pertama*, keretakan Hubungan Antar Kelompok – Sebuah konflik antar kelompok mau tidak mau, meskipun telah berdamai, pasti tetap meninggalkan kebencian pada beberapa individu dalam kelompok tertentu. Tentunya, keretakan hubungan antara kelompok yang berkonflik merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan dan bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

*Kedua*, perubahan Kepribadian pada Individu – Individu-individu yang ada dalam kelompok sosial tertentu akan mengalami perubahan sifat. Biasanya mereka akan diliputi perasaan marah, curiga, dan membenci orang-orang yang menjadi lawan konfliknya. Terkadang kepribadian seseorang lambat laun akan berubah menjadi seseorang yang diliputi kecemasan. Ia tidak akan merasa tenang karena khawatir jika konflik akan terjadi lagi. Ia diliputi rasa curiga jika kelompok yang dulunya berkonflik dengan mereka kembali menyulut permasalahan.

*Ketiga*, kerusakan Harta Benda dan Jatuhnya Korban Jiwa – Konflik sosial yang sifatnya merusak bisa berakibat rusaknya harta benda yang dimiliki oleh kelompok sosial tertentu. Konflik sosial sering diikuti dengan tindakan anggota kelompok dari masing-masing kubu untuk bertindak dengan mengandalkan kekerasan. Kerusakan tempat tinggal, fasilitas umum, dan lain sebagainya, merupakan bukti konkret bahwa konflik sosial justru berakibat buruk terhadap kepemilikan harta benda dari masing-masing kelompok.

Penelitian ini berusaha untuk memetakan konflik, potensi konflik dan mengkaji tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dapat meminimalisir atau mencegah adanya konflik dalam masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka dapat diajukan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta dan faktor penyebab konflik sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimakah dampak konflik yang telah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
3. Bagaimana deskripsi wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui fakta dan faktor penyebab konflik sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- B. Untuk mengetahui dampak konflik yang telah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

C. Untuk mengetahui wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua manfaat :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai hasil karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu diskripsi baru mengenai studi tentang konflik, khususnya yang menyangkut tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik agar mampu menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi pengembang ilmu dan sebagai hasil karya ilmiah yang diharapkan menambah referensi, wawasan dan informasi terutama terkait dengan konflik dalam kehidupan sosial khususnya pengembang studi mengenai konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan gambaran pemetaan konflik dan potensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menangani dan mencegah adanya konflik dan potensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **E. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam kajian ini yakni tipe deskriptif, dengan begitu diharapkan mampu untuk mengetahui dan menjelaskan peta potensi konflik sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan berpedoman dengan data skunder dan hasil wawancara. Data yang digunakan ialah data intensitas (frekuensi) baik yang sifatnya masih berupa potensi konflik ataupun konflik yang telah terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sepenuhnya data sekunder. Data tersebut diperoleh dari lembaga pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Polres, Kodim 1003, MUI, instansi terkait, dan Aliansi Masyarakat Adat Hulu Sungai

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritik**

##### **1. Pengertian Konflik**

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 345). Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar

pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. (Irving M. Zeitlin, 2008: 156) Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 587) Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. (Soerjono Soekanto, 1993: 99) Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005: 68)

Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas. (Robert lawang, 2014: 53 24)

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

## **2. Bentuk-bentuk Konflik**

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

### **a. Berdasarkan sifatnya**

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif. *Pertama*, Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik

yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. *Kedua*, Konflik Konstruktif: Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. (Robert H. Lauer, 2001: 98 25)

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

*Pertama*, Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

*Kedua*, Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

*Ketiga*, Konflik Diagonal: Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu: (Kusnadi, 2002: 67)

a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.

- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut: (Kusnadi, 2002: 67)

- a. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
- b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.
- d. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan

kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu: (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011: 361)

a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005: 68. 14)

a. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.
- c. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

### 3. Dampak dari Adanya Konflik terhadap Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu: (Astrid Susanto, 2006: 70)

- a. Dampak positif dari adanya konflik. *Pertama*, Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
- b. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

Dampak negatif dari adanya konflik, yaitu: (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005: 68)

- a. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- b. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.
- c. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.

#### **4. Upaya-upaya Untuk Mengatasi Konflik**

Secara sosiologi, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat

dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. (Soetomo, 1995:77) Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. (Nasikun, 2003: 22)

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), détente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil. (Nasikun, 2003: 25) Menurut Nasikun, bentuk-bentuk pengendalian konflik ada enam yaitu:

- a. Konsiliasi (*conciliation*) Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.
- b. Mediasi (*mediation*) Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

- c. Arbitrasi berasal dari kata latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
- d. Perwasitan Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

## 5. Pendekatan Konflik dalam Penanganan suatu Konflik Sosial

Menurut Sultan Takdir Alisjhbana, konflik adalah perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama. (Sultan Takdir Alisjahbana, 1986 : 139)

Sedangkan Luthan, F., menyatakan konflik merupakan ketidak sesuaian nilai atau tujuan antara anggota organisasi, sebagaimana dikemukakan berikut : (Luthan, F., 1985 : 385)

*“Conflict has been defined as the condition of objective incompatibility between values or goal, as the behaviour of deliberately interfering with another’s goal achievement, and emotionally in term of hostility”.*

(“Konflik didefinisikan sebagai kondisi ketidaksesuaian secara objektif antara nilai-nilai dengan tujuan, sebagai perilaku yang secara sengaja ikut campur tangan terhadap pencapaian tujuan orang lain, dan secara emosional dalam pengertian permusuhan”).

Ada beberapa teori dalam penyelesaian konflik yaitu :

1. Teori fungsional struktural (*Integration approach, order approach, equilibrium approach*). Sudut pendekatan fungsional struktural ini menyatakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar kata sepakat para anggotanya atas nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu *general agreements* yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan diantara para anggota masyarakat. Ia memandang masyarakat sebagai suatu sistem *equilibrium*. Karena sifat yang demikian maka aliran pemikiran tersebut disebut *Integration approach, order approach, equilibrium approach*, atau dengan lebih populer disebut juga *structural-functional approach*. Teori inipun dikuatkan oleh Plato, August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Bronislaw Malinowski, Redcliffe Brown, dan Talcott Parsons. (Nasikun, 2007 : 11)

Pendekatan fungsionalisme struktural sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya sebagai berikut:  
(Nasikun, 2007 : 13)

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain;

- b. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik;
- c. Sekalipun integrasi sosial tersebut tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak kearah *equilibrium* yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecendrungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal;
- d. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan senantiasa terjadi juga, akan tetapi di dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Artinya, sekalipun integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses kearah sana.
- e. Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melalui penyesuaian-penyesuaian, dan tidak secara revolusioner. Perubahan unsur sosial budaya yang menjadi bangunan dasarnya tidak seberapa mengalami perubahan.
- f. Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan yaitu : penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut (*extra sistemix change*);

pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional; serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat

- g. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus diantara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Di dalam setiap masyarakat, demikian menurut pandangan *fungsionalisme struktural*, selalu terdapat tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip dasar tertentu dimana sebagian besar anggota masyarakat menganggap, serta menerimanya sebagai sesuatu hal yang mutlak benar. (Nasikun, 2007: 14)

Teori lebih menitik beratkan pada bagaimana cara manusia menghadapi dunia melalui sistem-sistem hubungan sosial, sengketa dan kontradiksi serta dasar-dasar konsensus, yang pada akhirnya menciptakan suatu integrasi. (Hari Peorwanto, 2000 : 143). Teori fungsionalisme struktural tersebut dalam perkembangannya dianggap kurang mampu menganalisis masalah-masalah perubahan kemasyarakatan. Karena pendekatan yang digunakan tersebut telah mengabaikan kenyataan bahwa sengketa dan kontradiksi-kontradiksi *intern* merupakan sumber bagi terjadinya perubahan-perubahan kemasyarakatan, dan kurang memberikan tempat yang wajar pada kenyataan bahwa suatu sistem sosial tidak terlalu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Suatu sistem sosial dapat juga

bersikap menolak perubahan-perubahan yang datang dari luar, baik dengan cara memelihara *status quo* maupun dengan cara melakukan perubahan-perubahan yang bersifat reaksioner. (Nasikun, 2007 : 18).

2. Teori Pendekatan Konflik, menurut teori konflik *Structuralist-Non Marxist* ditengahkan oleh Ralf Dahrendorf, didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut : (Nurhadiantomo, 2004 : 28).
  - a. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
  - b. Setiap masyarakat mengandung sengketa-sengketa di dalam dirinya, atau dengan kata lain, sengketa adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat.
  - c. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
  - d. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang yang lain.

Selanjutnya teori konflik yang lebih komprehensif sebagaimana dikemukakan oleh Pierre L. Van den Berghe, sebagai berikut : (Nurhadiantomo, 2004 : 28).

- a. Setiap struktur sosial, di dalam dirinya sendiri mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial.

- b. Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systemic change*) tidak selalu bersifat adjustive.
- c. Suatu sistem sosial, di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat *vicious circle*.
- d. Perubahan-perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian yang lama, tetapi dapat juga terjadi secara revolusioner.

Konflik senantiasa melekat dalam setiap masyarakat, tetapi makna konflik tersebut tergantung dari tingkat intensitasnya.

*Pertama*, bentuk konflik yang paling ringan adalah perbedaan pendapat dan jika dikelola dengan baik justru akan bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, adalah unjuk rasa atau demonstrasi (*a protest demonstration*) yang tidak menggunakan kekerasan. Munculnya demonstrasi ini, terutama jika perbedaan pendapat tidak dapat diproses dengan baik atau proses negosiasi antara pihak-pihak yang berbeda tidak tercapai kesepakatan. Dalam negara demokrasi, baik perbedaan pendapat maupun demonstrasi tentunya dapat dibenarkan. *Ketiga*, adalah kerusuhan, yaitu semacam demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan fisik, yang muncul baik karena unsur kesengajaan yang terencana, maupun adanya unsur spontanitas. Kerusuhan merupakan salah satu bentuk konflik dengan intensitas yang tinggi. Keempat, adalah serangan bersenjata (*armed attack*),

yang merupakan konflik dengan intensitas yang paling tinggi. (Nurhadiantomo, 2004 : 29).

Ada beberapa pendekatan untuk menganalisis konflik yakni :

1. Pendekatan ketahanan sosial (*Social Resilience*).

Pendekatan ini dilakukan upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat melalui proses-proses pembelajaran maupun pemberdayaan. Penguatan *civil/society*, merupakan kunci dalam hal ini. Pendekatan ketahanan nasional mengidentifikasi bahwa masyarakat tidak mudah memaknai isu-isu yang belum jelas dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa dalam masyarakat ada kemampuan internal untuk mengatasi (potensi konflik maupun perselisihan). (M. Mukhsin Jamil, 2007 : 39)

2. Pendekatan kesejahteraan (*Social Prosperity*)

Pendekatan kesejahteraan menyatakan bahwa konflik terjadi akibat dari adanya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya memicu sejumlah potensi kerawanan sosial. Oleh karena itulah maka kesejahteraan yang baik diasumsikan dapat mengeliminir konflik.

3. Pendekatan keamanan (*Security*)

Pendekatan keamanan mengindikasikan adanya tindakan-tindakan represif terhadap adanya setiap bentuk konflik. Dengan pendekatan keamanan, negara diasumsikan memiliki hak untuk melewati pencegahan ataupun meredam konflik. Ini dicapai dengan melibatkan alat-alat keamanan negara. (M. Mukhsin Jamil, 2007 : 40)

#### 4. Pendekatan Asimilatif

Pendekatan asimiliasi bertujuan untuk mengaburkan identitas lama dan sebaliknya membentuk identitas baru. Sangat sering konflik dipicu oleh perbedaan-perbedaan identitas, baik etnik maupun agama. Etnik dan agama merupakan pembentuk identitas yang handal. Sangat sering melahirkan batasan-batasan sosial (*social boundaries*). Antara "kita" dan "mereka" orang merasa dipaksa untuk memilih kita atau mereka.

#### 5. Pendekatan pembagian kekuasaan (*Power Sharing*)

Konflik politik biasanya dapat terpecahkan dengan melakukan pembagian kekuasaan pada mereka yang terlibat dalam konflik. Politik adalah kekuasaan. Pembagian kekuasaan sering menjadi jalan keluar untuk mengakhiri konflik dimasyarakat.

#### 6. Pendekatan Hukum

Hukum yang diasumsikan dapat menyelesaikan persoalan, justru menimbulkan persoalan ketidakadilan. Hukum pada kenyataannya sering memihak dan sebaliknya tidak memberikan keadilan bagi semua terutama yang miskin. Penegakan hukum adil dan tidak memihak karena dipercaya dapat mencegah konflik atau mengakhiri konflik. Selama hukum tidak bisa memberikan rasa adil, maka konflik akan terus bermunculan. (M. Mukhsin Jamil, 2007 : 41)

Berbeda yang dikatakan Leavitt, H. J., untuk mengatasi konflik dapat dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut : (Wahyudi, 2006 : 57)

### 1. Teknik Konfrontasi

Pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan melalui pertemuan tatap muka antar kelompok yang sedang konflik. Tujuan pertemuan adalah untuk mengenal permasalahan dan menyelesaikannya. Kelompok-kelompok yang sedang konflik diberi kesempatan berdebat secara terbuka mengenai berbagai topik dan membahas semua masalah yang relevan sampai keputusan tercapai.

### 2. Teknik Negosiasi dan tawar-menawar

Perundingan mempertemukan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing pihak membawa serangkaian usulan, kemudian didiskusikan dan dilaksanakan. Setiap anggota menyadari pentingnya tawar-menawar untuk menyelesaikan perdebatan, masing-masing menurunkan tuntutan optimal sehingga mencapai titik temu. Dalam perundingan itu tidak ada yang dikalahkan, semua pihak menghindari perasaan yang memenangkan tuntutan.

### 3. Teknik Penyerapan (*absorption*)

Mengelola konflik organisasi antara kelompok besar dengan kelompok kecil. Kelompok kecil mendapat sebagian yang diinginkannya tetapi sebagai konsekuensinya harus ikut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. (Wahyudi, 2006 : 57)

Dari berbagai pendekatan di atas tentu memiliki kelemahan masing-masing oleh karena setiap masyarakat mengandung konflik dalam dirinya atau perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam masyarakat. Menurut penulis kaitannya dengan konflik pertanahan lebih relevan melalui pendekatan kesejahteraan dan pendekatan hukum, karena timbulnya masalah konflik pertanahan antara lain disebabkan adanya kemiskinan dan rakyat tidak mempunyai tanah sebagai sumber kehidupannya. Dengan menrestribusi tanah-tanah negara yang tidak dimanfaatkan, maka kesempatan rakyat untuk memperbaiki kesejahteraan ekonominya akan lebih besar serta martabat sosialnya meningkat dan hak-hak dasarnya akan terpenuhi. Melalui pendekatan hukum yang adil dan tidak memihak dalam menyelesaikan konflik-konflik pertanahan akan mencegah konflik baru yang timbul dikemudian hari.

## **B. Landasan Operasional**

Adapun landasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu:

1. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.

7. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
9. Penanganan Konflik bertujuan: (1) menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; (2) memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; (3) meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (4) memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; (5) melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; (6) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan (7) memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.
10. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap Korban Konflik.
11. Korban Konflik adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat Konflik.
12. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi

terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

13. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

14. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

## BAB III

### PROFIL WILAYAH PENELITIAN

#### A. Letak Geografis.

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara 02°29'58"LS - 02°56'10"LS dan 114°51'19"BT - 115°36'19"BT. Sedangkan ibukotanya yaitu Kecamatan Kandangan terletak 2°47'LS dan 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan

Sebelah timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru

Sebelah selatan: Kabupaten Tapin

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiap-tiap kecamatan terlihat pada tabel 2.1 berikut

**Tabel 3.1 Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	Padang Batung	203,93	17
2	Loksado	Loksado	338,89	11
3	Telaga Langsung	Telaga Langsung	58,08	11
4	Angkinang	Angkinang	58,40	11
5	Kandangan	Kandangan	106,71	18

6	Sungai Raya	Sungai Raya	80,96	18
7	Simpur	Simpur	82,35	11
8	Kalumpang	Kalumpang	135,07	9
9	Daha Selatan	Tumbukan Banyu	322,80	16
10	Daha Utara	Tambak Bitin	268,11	19
11	Daha Barat	Bajayau	149,62	7
<b>Jumlah</b>			<b>1804,92</b>	<b>148</b>

Sumber: BPS Kab HSS, 2017

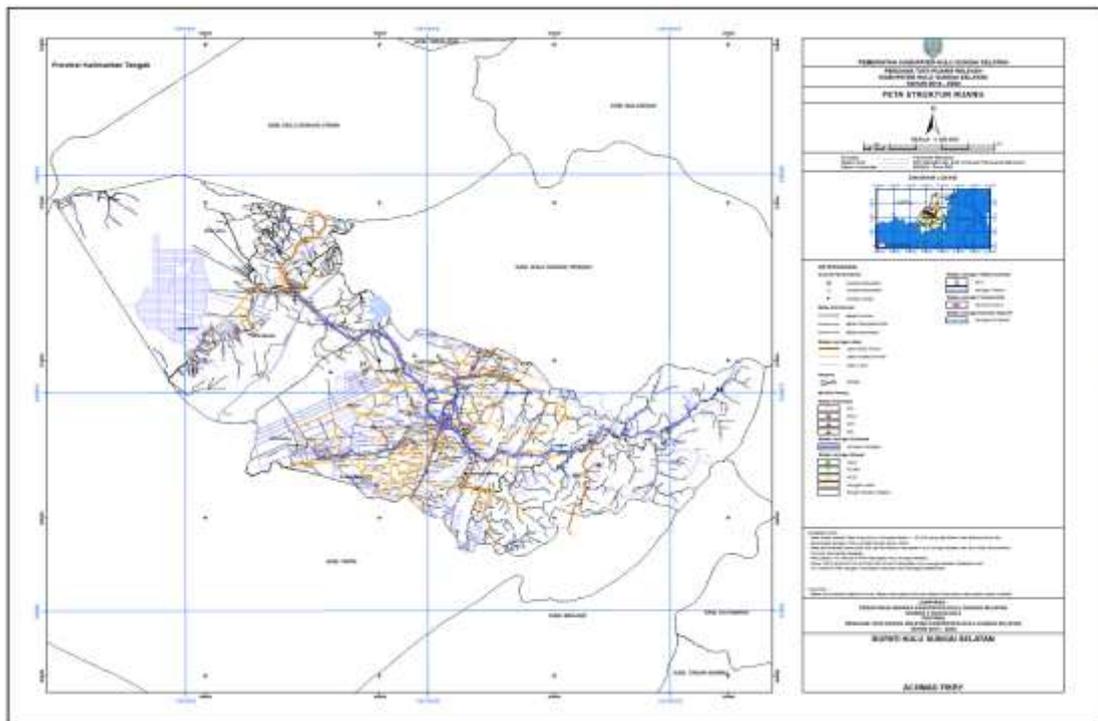
Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa (rawa menoton), sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Salah satu faktor tanah yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah faktor ketinggian tempat dan kemiringan wilayah.

Klasifikasi ketinggian dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelas, yang seolah-olah terbagi dua, yaitu wilayah sebelah barat berupa dataran rendah dengan kondisi medan umumnya datar, sedangkan wilayah sebelah timur medannya bervariasi. Daerah dengan ketinggian 0-25 meter atau relatif datar seluruhnya terdapat dibagian barat. Secara keseluruhan, daerah relatif datar ini luasnya mencapai 123.452 Ha atau  $\pm$  68% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Daerah dengan ketinggian di atas 25 meter dimulai dari wilayah Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsung, Angkinang, dan Sungai Raya

mengarah kesebelah timur. Wilayah yang paling luas adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian antara 0 sampai 7 meter, dengan persentase mencapai 58,3 %. Sedangkan wilayah ketinggian yang paling sempit adalah wilayah dengan klasifikasi ketinggian di atas 1000 meter dengan persentase 0,9% yang hanya terdapat di Kecamatan Loksado.

Wilayah sebelah barat didominasi oleh daerah genangan (rawa) atau persawahan. Daerah ini meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan sedikit wilayah Kecamatan Kalumpang dan Angkinang. Sedangkan wilayah sebelah timur terutama Kecamatan Loksado umumnya berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman keras (tahunan).



**Gambar 3.1. Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

## B. Demografi

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 229.889 jiwa yang terdiri atas 114.892 jiwa penduduk laki-laki dan 114.997 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,20% dan angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,91.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 mencapai 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 471 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di kecamatan Loksado sebesar 26 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2010	2015	2016	2010-2016	2015-2016
1	Padang Batung	19.510	20.847	21.092	1,30	1,17
2	Loksado	8.202	8.839	8.968	1,49	1,45
3	Telaga Langsat	8.996	9.619	9.750	1,34	1,35
4	Angkinang	16.765	17.718	17.905	1,10	1,05
5	Kandangan	46.744	49.737	50.293	1,22	1.11

6	Sungai Raya	16.439	17.379	17.558	1,10	1,02
7	Simpur	13.947	14.550	14.668	0,84	0,81
8	Kalumpang	6.064	6.309	6.357	0,79	0,76
9	Daha Selatan	39.149	41.939	42.498	1,37	1,32
10	Daha Utara	7.203	7.799	7.915	1,57	1,48
11	Daha Barat	30.095	32.417	32.885	1,48	1,43
<b>Jumlah</b>		<b>213.114</b>	<b>227.153</b>	<b>229.889</b>	<b>1,26</b>	<b>1,20</b>

Sumber: BPS Kab HSS, 2017

Selanjutnya dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka diperlukan lapangan kerja baru untuk menampung jumlah penduduk tersebut. Berikut peningkatan Lapangan pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016. Peningkatan Lapangan pekerjaan secara umum belum cukup mampu memenuhi semua sektor dikarenakan masih ada sektor yang dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 3.3 Lapangan Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin**

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	43,66	35,12	40,16
2	Pertambangan dan Penggalian	2,53	0,00	1,49
3	Industri Pengolahan	10,02	9,66	9,87
4	Listrik, Gas, dan Air	0,00	0,00	0,00
5	Bangunan	6,66	0,00	3,93

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	17,65	34,26	24,47
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	3,37	0,00	1,99
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Perumahan, Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	1,54	1,51	1,52
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	14,58	19,45	16,58
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kab HSS, 2017

Berdasarkan data diatas, peningkatan lapangan pekerjaan secara umum belum cukup mampu memenuhi semua sektor dikarenakan masih ada sektor yang belum dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### C. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan diukur dari besaran PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2016. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 meningkat dari 4,7 triliun pada tahun 2014 menjadi 5,2 triliun rupiah.

**Tabel 3.4 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016**

Tahun	Harga berlaku (Juta Rupiah)	Harga konstan (Juta Rupiah)
2013	3.801.446,16	3.334.465,09
2014	4.258.173,45	3.527.586,59
2015	4.782.347,48	3.741.146,62
2016	5.236.784,76	3.968.727,46

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

**Tabel 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2016**

No	Sektor / Industri	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2.63	4.37	4.97	5.84
2	Pertambangan dan Penggalian	35.79	9.09	5.19	7.11
3	Industri Pengolahan	2.12	3.51	4.46	6.17
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-2.25	21.97	22.49	7.16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.77	8.39	6.77	6.31
6	Konstruksi	5.07	5.09	5.74	5.35
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6.30	5.85	5.95	5.76
8	Transportasi dan Pergudangan	7.09	5.54	5.50	4.92
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	5.62	6.69	7.02	8.23
10	Informasi dan Komunikasi	7.87	8.43	8.79	7.80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.66	6.63	4.22	8.88
12	Real Estate	8.68	5.44	5.58	5.94

No	Sektor / Industri	2013	2014	2015	2016
13	Jasa Perusahaan	4.30	6.82	6.64	8.12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	5.76	5.73	8.68	2.04
15	Jasa Pendidikan	7.46	7.38	8.63	8.68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.56	6.61	7.80	8.44
17	Jasa Lainnya	3.60	7.68	5.97	7.29
<b>Perumbuhan PDRB</b>		5.68	5.79	6.05	6.08

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tumbuh sebesar 6,08 persen meningkat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 6,05 persen dan tahun 2014 yang tumbuh mencapai 5,79 persen.

### 1. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sampai dengan tahun 2016 sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu, program pembangunan diprioritaskan bidang pertanian yang disinergikan dengan bidang / sektor lain.

**Tabel 3.6. Struktur PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015**

(Persen/ percentage)

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29.65	27.51	27.02	27.24	27.29
2	Pertambangan dan Pengegalian	7.60	9.41	9.27	8.13	7.57

No	Sektor/Industri	2012	2013	2014	2015	2016
3	Industri Pengolahan	8.46	8.05	7.96	7.98	8.13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.37	0.35	0.36	0.37	0.36
6	Konstruksi	7.87	7.79	7.94	8.17	8.04
7	Perdagangan Besar dan Eceran	9.12	9.25	9.31	9.18	9.22
8	Transportasi dan Pergudangan	5.13	5.24	5.25	5.15	5.10
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	3.46	3.45	3.57	3.56	3.60
10	Informasi dan Komunikasi	4.26	4.20	4.29	4.21	4.19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.93	2.06	2.13	2.07	2.11
12	Real Estate	2.48	2.52	2.52	2.47	2.45
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	9.09	9.55	9.54	10.07	9.60
15	Jasa Pendidikan	7.07	7.07	7.17	7.52	7.94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.82	1.88	1.94	2.04	2.10
17	Jasa Lainnya	1.55	1.52	1.58	1.64	2.10
PDRB HSS		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017

## 2. PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita suatu wilayah merupakan salah satu indikator yang memperlihatkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk, namun demikian indikator yang lazim digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah dengan pendekatan pengeluaran per kapita dan PDRB per kapita. Data rata-rata pendapatan

(Income) per kapita digunakan untuk mendapatkan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah dan waktu tertentu. PDRB Per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PRDB dengan penduduk pada tahun yang sama di wilayah studi.

**Tabel 3.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012-2016**

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Perkapita (ADHB)	15.743.437	17.153.457	18.969.562	21.053.420	22.779.623
PDRB Perkapita (ADHK)	14.413.916	15.046.275	15.714.901	16.469.721	17.263.668
PDRB Perkapita (ADHB) %	7,32	8,96	10,59	10,99	8,20
PDRB Perkapita (ADHK) %	3,93	4,39	4,44	4,80	4,82

Sumber: BPS Hulu Sungai Selatan, 2017 (diolah)

PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan mencapai 22,7 juta Rupiah dengan pertumbuhan atas harga berlaku sebesar 8,20 persen. Namun, apabila diukur dalam USD maka PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk dalam kategori berpendapatan menengah bawah.

Dilihat dari sisi PDRB per kapita konstan, PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 3,93 persen menjadi 4,82 persen pada tahun 2016. Kondisi yang terjadi sangat

dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### 3. Ketenagakerjaan

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian tahun 2016 sebesar 1.741 pekerja. Dari 1.741 pekerja yang terdaftar sebesar 546 telah ditempatkan bekerja.

Proporsisi terbesar pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpendidikan terakhir SMA/SMK yaitu sebesar 64,85 persen (1.129 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 310 pekerja tahun 2016.

**Tabel 3.8 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2015**

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i></b>	<b>82,79</b>	<b>56,82</b>	<b>69,65</b>
Bekerja/ <i>Working</i>	80,75	54,90	67,67
Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	2,04	1,92	1,98
<b>Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i></b>	<b>17,21</b>	<b>43,18</b>	<b>30,35</b>
Sekolah/ <i>Attending School</i>	7,85	8,01	7,93

Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	3,57	32,04	17,97
Lainnya/ <i>Others</i>	5,80	3,12	4,44
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/<i>Economically Active Participation Rate</i></b>	<b>82,79</b>	<b>56,82</b>	<b>69,65</b>
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka/<i>Unemployment Rate</i></b>	<b>2,46</b>	<b>3,39</b>	<b>2,84</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksinya pada tahun 2016 dimana aktivitas yang dilakukan oleh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas seminggu yang lalu mayoritas angkatan kerja sebesar 69,65 persen, sebesar 30,35 persen adalah bukan angkatan kerja, sebesar 67,67 persen adalah bekerja, sebesar 1,98 persen adalah pengangguran terbuka dan sebesar 7,93 adalah sekolah sedangkan 17,97 persen adalah mengurus rumah tangga.

Berdasarkan komposisi dari aktivitas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 dimana aktivitas yang lebih banyak dilakukan adalah berjenis kelamin laki-laki dengan melihat perbandingannya. Hal ini juga termasuk dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 82,79 persen dilakukan oleh laki-laki sedangkan 56,82 persen hanya dilakukan oleh perempuan, selain itu tingkat pengangguran terbuka juga lebih banyak perempuan yaitu sebesar 3,39 persen dibanding laki-laki hanya sebesar 2,46 persen.

#### D. Pendidikan

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/ sederajat selama tahun ajaran 2015/2016, terdapat 251 SD dan 41 unit Madrasah Ibtidaiyah. Pada tingkat SMP, jumlah sekolah mencapai 34 unit dan 22 unit Madrasah Tsanawiyah. Jumlah SMA, MA, dan SMK masing-masing 9 unit, 10 unit, dan 4 unit. Dalam konteks lain, rasio murid-guru dan murid sekolah merupakan indikator penting. Untuk mengukur daya tampung dan efektifitas proses belajar mengajar. Ketersediaan Sarana fisik sekolah misalnya, menjadi semakin efektif kalau jumlahnya sepadan. Dengan daya tampung muridnya. Demikian juga guru dan murid, proses belajar mengajar. Akan menjadi semakin terjamin kalau seseorang guru tidak mengajar terlalu banyak murid. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jumlah murid SD/MI tahun 2015/2016 mencapai 24.703 Orang, sedangkan tenaga guru sebanyak 2.970 orang. Ini berarti rasio murid-guru pada jenjang SD/MI sebesar 8,32. Dengan kata lain, tiap guru SD/MI mendidik/mengajar rata-rata 8 orang Murid.

**Tabel 3.9 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016.**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah <i>Sex and School Age Group</i>	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Laki-Laki/Male</b>			
7-12	0,00	99,05	0,95
13-15	0,00	94,26	5,74
16-18	0,00	67,01	32,99

<b>19-24</b>	<b>0,00</b>	<b>17,17</b>	<b>82,83</b>
<b>7-24</b>	<b>0,00</b>	<b>70,26</b>	<b>29,74</b>
<b>Perempuan/Female</b>			
<b>7-12</b>	<b>1,25</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>
<b>13-15</b>	<b>0,00</b>	<b>89,30</b>	<b>10,70</b>
<b>16-18</b>	<b>0,00</b>	<b>79,08</b>	<b>20,92</b>
<b>19-24</b>	<b>0,65</b>	<b>16,94</b>	<b>82,41</b>
<b>7-24</b>	<b>0,58</b>	<b>71,10</b>	<b>28,32</b>
<b>Laki-Laki+Perempuan Male/Female</b>			
<b>7-12</b>	<b>0,50</b>	<b>98,93</b>	<b>0,57</b>
<b>13-15</b>	<b>0,00</b>	<b>91,25</b>	<b>8,75</b>
<b>16-18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,66</b>	<b>27,34</b>
<b>19-24</b>	<b>0,30</b>	<b>17,06</b>	<b>82,64</b>
<b>7-24</b>	<b>0,27</b>	<b>70,65</b>	<b>29,08</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 dimana jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sebesar 0,27 persen adalah tidak.belum pernah sekolah, sebesar 70,65 persen adalah penduduk yang masih berstatus sekolah sedangkan sebesar 29,08 persen adalah penduduk yang tidak sekolah lagi. Mayoritas penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu berstatus masih sekolah yang berumur 7-24 tahun.

Berdasarkan komposisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjenis kelamin laki-laki berstatus tidak./belum pernah sekolah tidak ada, sebesar 70,26 persen penduduk masih berstatus masih sekolah dan sebesar 29,74 persen berstatus tidak sekolah lagi. Selain itu penduduk yang berjenis kelamin perempuan dimana sebesar 0,58 persen masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah sekolah, sebesar 71,10 persen penduduk berstatus masih sekolah dan sebesar 28,32 persen berstatus tidak sekolah lagi.

**Tabel 3.10 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun keatas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016.**

Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan <i>Educational Attainment</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>No Schooling</i>	3,97	3,96	3,97
Tidak/Belum Tamat SD <i>Not Yet Completed Primary School</i>	29,49	26,83	28,17
Sekolah Dasar <i>Primary School</i>	35,02	38,93	36,95
Sekolah Menengah Pertama <i>Junior High School</i>	7,55	12,29	9,89
Sekolah Menengah Atas <i>Senior High School</i>	19,78	11,93	15,91
Diploma I/II/III Akademi <i>Diploma I/II/III/Academy</i>	1,24	1,10	1,17
Universitas (DIV/S1/S2/S3) University <i>(DIV/Bachelor/Master/Doctor)</i>	2,95	4,96	3,94
<b>Jumlah/Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas Kor Maret 2016

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 dimana penduduk berumur 5 tahun ke atas dengan tingkat persentasi sebesar 36,95 persen berpendidikan Sekolah Dasar, sebesar 28,17 persen berstatus tidak.belum tamat SD sedangkan 1,17 persen berstatus Diploma I/II/III dan berstatus Universitas (DIC/S1/S2/S3) hanya sesbesar 3,94 persen.

Berdasarkan hasil komposisi penduduk kabupaten hulu sungai selatan dimana mayoritas penduduk berjenis kelamin perempuan dengan tingkat pendidikan sekolah dasar yang dominan sebesar 38,93 persen sedangkan berstatus tidak/belum tamat SD sebesar 29,49 adalah berjenis kelamin laki-laki dan yang memiliki pendidikan tinggi yaitu berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 4,96 persen.

**Tabel 3.11 Angka Melek Huruf Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Selatan, 2016.**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Femalae</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
15-19	100,00	100,00	100,00
20-24	100,00	100,00	100,00
25-29	100,00	100,00	100,00
30-34	100,00	100,00	100,00
35-39	100,00	100,00	100,00
40-44	100,00	100,00	100,00
45-49	100,00	100,00	100,00
50-54	100,00	100,00	100,00
55—59	100,00	100,00	100,00
60+	98,14	76,80	85,91
<b>Jumlah/Total</b>	<b>99,79</b>	<b>96,63</b>	<b>98,18</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas Kor Maret 2016*

Penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 berdasarkan total angka melek huruf dimana sebesar 98,18 persen penduduk terbagi sebesar 99,79 persen adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 96,63 persen adalah berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan hasil komposisi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 dimana kelompok umur dari 15-59 baik laki-laki maupun

perempuan sebesar 10 persen, sedangkan pada kelompok umur 60 tahun ke atas sebesar 98,14 persen adalah berjenis kelamin laki-laki sedangkan sebesar 76,80 persen adalah berjenis kelamin perempuan, sehingga jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada umur 60 tahun ke atas adalah 85.91 persen.

### E. Kesehatan

Pada tahun 2016 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 4 unit rumah sakit, 25 unit rumah bersalin, 21 unit puskesmas, dan 106 unit poskesdes. Berdasarkan data dinas kesehatan dan rumah sakit yang terdapat di Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 53 orang Dokter Umum dan 42 Dokter Spesialis serta 6 orang Dokter Gigi selain itu juga terdapat 444 orang Perawat dan 268 orang Bidan.

**Tabel 3.12 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016.**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Rumah Sakit Hospital</b>	<b>Rumah Bersalin Maternity Hospital</b>	<b>Puskesmas Rawat Inap Inpatient Public Health Center</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Padang Batung	-	1	-
2	Loksado	-	-	-
3	Telaga Langsat	-	-	-
4	Angkinang	-	1	1
5	Kandangan	1	7	-
6	Sungai Raya	2	2	-
7	Simpur	-	3	1
8	Kalumpang	-	1	-
9	Daha Selatan	1	4	-

10	Daha Barat	-	-	1
11	Daha Utara	-	6	1
<b>Hulu Sungai Selatan</b>				
<b>2016</b>		<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>
<b>2015</b>		<b>3</b>	<b>32</b>	<b>3</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas Kor Maret 2016

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2015 dimana jumlah fasilitas kesehatan terbagi atas 3 (tiga) komponen yaitu sebesar 3 buah adalah rumah sakit, sebanyak 32 (tiga puluh dua) adalah rumah bersalin dan sebanyak 3 (tiga) buah adalah puskesmas rawat inap. Tetapi pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) buah penambahan rumah sakit dan 1 (satu) buah puskesmas rawat inap sedangkan rumah sakit bersalin terdapat pengurangan sebanyak 5 (lima) buah dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan komponen jumlah fasilitas yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimana rumah sakit di kecamatan Sungai Raya terdapat 2 (dua) buah, sedangkan puskesmas terbanyak terdapat pada kecamatan Kandangan yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah sedangkan puskesmas rawat inap terdapat pada kecamatan Angkinang, Simpur, Daha barat dan Daha Utara.

**Tabel 3.13 Jumlah Dokter Praktek Perorangan dan Bersama Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Praktik Dokter Bersama Joint Doctor Practice</b>	<b>Praktik Dokter Perorangan Individual Doctor Practice</b>
	<b>(1)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>
1	Padang Batung	-	-

2	Loksado	-	-
3	Telaga Langsat	-	-
4	Angkinang	-	-
5	Kandangan	1	14
6	Sungai Raya	-	10
7	Simpur	-	-
8	Kalumpang	-	-
9	Daha Selatan	-	1
10	Daha Barat	-	-
11	Daha Utara	-	3
<b>Hulu Sungai Selatan</b>			
<b>2016</b>		<b>1</b>	<b>28</b>
<b>2015</b>		<b>-</b>	<b>38</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Hasil proyeksi pada tahun 2016 dimana fasilitas seperti praktik dokter bersama yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) buah sedangkan untuk Praktek Dokter Perorangan lebih banyak yaitu 28 (dua puluh delapan) orang. Hal ini merupakan terdapat peningkatan dari jumlah sebelumnya sedangkan untuk dokter perorangan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya

Berdasarkan komposisi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 dimana Praktek dokter bersama hanya terdapat pada kecamatan Kandangan sedangkan untuk perorangan terdapat pada kecamatan Kandangan sebanyak 14 (empat belas) orang, Sungai Raya sebanyak 10 (sepuluh) orang, selanjutnya di kecamatan Daha Selatan terdapat 1 (satu) orang dan Daha Utara terdapat sebanyak 3 (tiga) orang.

**Tabel 3.14 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Rumah Sakit Hospital</b>	<b>Rumah Bersalin Maternity Hospital</b>	<b>Puskesmas Rawat Inap Inpatient Public Health Center</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Dinas Kesehatan	-	-	-
Puskesmas Kandangan	-	3	1
Puskesmas Jambu Hilir	-	2	1
Puskesmas Gambah	-	1	-
Puskesmas Bayanan	-	1	1
Puskesmas Bajayau	-	1	-
Puskesmas Negara	-	3	-
Puskesmas Pasungkan	-	1	-
Puskesmas Simpur	-	2	-
Puskesmas Wasah	-	1	-
Puskesmas Sungai Raya	-	1	-
Puskesmas Batang Kulur	-	1	-
Puskesmas Padang Batung	-	1	-
Puskesmas Kaliring	-	1	-
Puskesmas Angkinang	-	2	-
Puskesmas Bamban	-	1	-
Puskesmas Telaga Langsung	-	1	-
Puskesmas Kalumpang	-	1	-
Puskesmas Laksado	-	1	1
Puskesmas Malinau	-	2	-
Puskesmas Sungai Pinang	-	1	-
Puskesmas Baruh Jaya	-	1	-
BLUD RS Hasan Basry	18	5	2
Bangsai Jiwa RSUD Hasan Basry	2	1	-
RS Pahlawan Medical Center	9	3	-
RS Ceria	13	9	-
RSU Daha Sejahter	-	6	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>42</b>	<b>563</b>	<b>6</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Rumah Sakit, 2016

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdsarakan hasil proyeksi pada tahun 2016 dimana jumlah dokter pada setiap fasilitas kesehatan terdapat sebanyak 42 (empat puluh dua) orang di Rumah Sakit, sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) terdapat pada Rumah sakit bersalin dan sebanyak 6 (enam) terdapat di Puskesmas Rawat Inap.

Berdasarkan komposisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 dimana mayoritas terbanyak pada Rumah Sakit 18 (delapan belas) orang terdapat pada BLUD RS Hasan Basry, sedangkan pada Rumah sakit bersalin terdapat 9 (sembilan) orang yang terdapat pada RS Ceria, dan untuk poskesmas rawat inap terdapat 2 (dua) orang terdapat pada BLUD RS Hasan Basry.

#### F. Agama

Berdasarkan Agama yang dianut, tahun 2016 terdapat 98,50 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya adalah Protestan, Katolik, Hindu Budha. Selain Agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

**Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Islam Islam</b>	<b>Protestan Christian</b>	<b>Katolik Catholic</b>	<b>Hindu Hindu</b>	<b>Budha Buddha</b>	<b>Lainnya Other</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1	Padang Batung	21 734	-	-	-	-	-
2	Loksado	4 967	1 103	-	-	-	3 095
3	Telaga Langsat	11 399	-	-	-	-	-
4	Angkinang	16 970	-	-	-	-	-
5	Kandangan	55 056	162	14	15	7	-
6	Sungai Raya	77 591	13	-	-	-	-
7	Simpur	13 574	-	-	-	-	-
8	Kalumpang	7 390	-	-	-	-	-
9	Daha Selatan	45 783	-	-	-	-	-

10	Daha Barat	2 447	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	32 289	-	-	-	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>							
	<b>2016</b>	<b>289 200</b>	<b>1 278</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3 095</b>
	<b>2015</b>	<b>244 063</b>	<b>1 385</b>	<b>29</b>	<b>405</b>	<b>6</b>	<b>2 782</b>

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 menurut Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama dimana terbagi 6 yaitu pada agama islam sebanyak 289.200 jiwa, agama Protestan sebanyak 1.278 jiwa, agama Katolik sebanyak 14 jiwa, agama Hindu sebanyak 15 jiwa, agama Budha sebanyak 7 jiwa dan agama lainnya sebanyak 3.095 jiwa. hal tersebut meningkat dari tahu sebelumnya.

Berdasarkan komposisi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama dimana penduduk yang memeluk agama Islam terdapat pada kecamatan Padang Batur, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Barat dan Daha Utara, kecamatan yang penduduknya memeluk agama Protestan terdapat pada kecamatan Loksado, Kandangan dan Sungai Raya, kecamatan yang penduduknya memeluk agama Katolik terdapat pada Kecamatan Kandangan, kecamatan yang penduduknya memeluk agama Hindu terdapat pada kecamatan Kandangan, kecamatan yang penduduknya memeluk agama Budha terdapat pada kecamatan Kandangan, kecamatan yang penduduknya memeluk agama lainnya terdapat pada kecamatan Loksado.

**Tabel 3.16 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Masjid Mosque</b>	<b>Langgar Langgar</b>	<b>Mushola Mushola</b>	<b>Gereja Protestan Christian Church</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Padang Batung	23	24	3	-
2	Loksado	11	18	2	2
3	Telaga Langsat	10	34	-	-
4	Angkinang	10	54	7	-
5	Kandangan	20	123	7	-
6	Sungai Raya	14	88	5	-
7	Simpur	11	67	8	-
8	Kalumpang	5	30	1	-
9	Daha Selatan	8	81	-	-
10	Daha Barat	4	24	1	-
11	Daha Utara	10	86	6	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>					
<b>2016</b>		<b>126</b>	<b>649</b>	<b>40</b>	<b>2</b>
<b>2015</b>		<b>125</b>	<b>659</b>	<b>34</b>	<b>2</b>

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.2**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Gereja Katholik Catholic Church</b>	<b>Pura Temple</b>	<b>Vihara Vihara</b>	<b>Balai Hall</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Padang Batung	-	-	-	-
2	Loksado	-	-	-	41
3	Telaga Langsat	-	-	-	-
4	Angkinang	-	-	-	-
5	Kandangan	-	-	-	-
6	Sungai Raya	-	-	-	-
7	Simpur	-	-	-	-
8	Kalumpang	-	-	-	-
9	Daha Selatan	-	-	-	-
10	Daha Barat	-	-	-	-
11	Daha Utara	-	-	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>					
<b>2016</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>
<b>2015</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 menurut Jumlah Tempat Peribadatan terbagi 8 yaitu pada Mesjid sebanyak 126 buah, Langgar sebanyak 649 buah, Mushola sebanyak 40 buah, Gereja Protestan Sebanyak 2 buah, dan Balai sebanyak 41 buah sedangkan Gereja Katholik, Pura dan Vihara tidak ada.

Berdasarkan komposisi Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Tempat Peribadatan dimana mesjid, Langgar dan Moshola terdapat pada kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsung, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Barat dan Daha Utara, sedangkan Gereja Protestan dan Balai hanya terdapat di Kecamatan Loksado.

### **G. Kriminalitas**

Sepanjang tahun 2016, kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan mencatat sebanyak 214 tindak pidana. Tindak pidana paling banyak di wilayah kepolisian Sektor kandangan sebanyak 54 tindak pidana.

**Tabel 3.17 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2014-2016**

	<b>Kepolisian Sektor <i>Subdistrict Police Office</i></b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Padang Batung	13	15	21
2	Loksado	8	6	12
3	Telaga Langsung	7	7	16
4	Angkinang	10	17	28

5	Kandangan	61	56	54
6	Sungai Raya	15	26	27
7	Simpur	3	9	14
8	Kalumpang	4	2	3
9	Daha Selatan	15	10	28
10	Daha Barat	-	-	-
11	Daha Utara	5	13	11
<b>Hulu Sungai Selatan</b>		<b>136</b>	<b>148</b>	<b>214</b>

*Sumber: Polisi Resort Hulu Sungai Selatan*

Menurut hasil pelaporan yang masuk kepolisian pada tahun 2014 terjadi pelanggaran hukum dengan total 136 kasus sedangkan pada tahun 2015 148 kasus dan pada tahun 2016 jumlahnya sekitar 214 kasus. Yang mana dari beberapa daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, paling banyak melakukan tindakan kriminal berasal dari kota kandangan dengan total 171 kasus selama 3 tahun.

Berdasarkan komposisi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 sampai 2016 dimana yang paling banyak melakukan tindakan kriminal di dominasi oleh penduduk dari Kota Kandangan dengan total 171 kasus, setelah itu diikuti oleh Kota Sungai Raya dengan jumlah 68 kasus dan yang terendah berasal dari kota Daha Barat dengan 0 kasus dalam artian penduduk Kota Daha Barat tidak pernah sama sekali melakukan tindakan kriminal selama 3 tahun.

**Tabel 3.18 Presentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2014-2016**

	<b>Kepolisian Sektor Subdistrict Police Office</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Padang Batung	93	80	95,2
2	Loksado	63	66	108,3
3	Telaga Langsat	43	43	87,5
4	Angkinang	70	65	89,3
5	Kandangan	74	70	83,3
6	Sungai Raya	80	39	96,3
7	Simpur	67	45	92,9
8	Kalumpang	100	50	100
9	Daha Selatan	74	60	92,9
10	Daha Barat	-	-	-
11	Daha Utara	100	100	90,9

*Sumber: Polisi Resort Hulu Sungai Selatan*

Kabupaten Hulu Sungai selatan berdasarakan hasil proyeksi pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor dimana tingkat persentasi tertinggi terdapat pada kecamatan Loksado sebesar 108,3 persen, sedangkan di tahun sbelumnya hanya terdapat 66 kasus pada tahun 2015 dan sebayak 63 kasus pada tahun 2014. Selain itu tingkat terendah tindak pidana dengan persentasi tidak ada terdapat di kecamatan Daha Barat.

**Tabel 3.19 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

<b>Jenis Tindak Pidana <i>Type of Case</i></b>	<b>Dilaporkan <i>Reported</i></b>	<b>Diselesaikan <i>Cleared</i></b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Obat Farmasi	82	82
Sajam	60	60
Curanmor	34	25
Sabu-Sabu	19	19
Curat	19	12
Anirat	18	15
Kebakaran	17	17
Tipiring	11	11
Judi	10	10
Curbis	7	8
Curas	6	6
Aniaya	7	6
Penggelapan	3	4
Persetubuhan	5	2
Perzinahan	2	2
Kekerasan Terhadap Anak	1	-
Cabul Terhadap Anak	1	1
Setubuh Anak	2	2
Illegal Logging	4	4
Illegal BBM	4	4
KDRT	1	1
Penipuan	3	2
Pengeroyokan	4	5
Penembakan	1	1
Curing	2	1
Temu Mayat	9	8
Lari Wanita Dibawah Umur	1	-

Mayat Tenggelam	1	1
Pengancaman	1	1
Pembunuhan	3	3
Pencobaan Curi	1	-
Strum Ikan	1	1
<b>Jumlah/Total</b>	<b>340</b>	<b>314</b>

Sumber: Polisi Resort Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 menurut Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Tidak Pidana dimana jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 340 kasus dan dan yang sudah di selesaikan sebanyak 314 kasus yang terbagi atas 32 jenis tindak pidana.

Berdasarkan komposisi tersebut menurut tindak pidana dimana jenis pidana yang terbesar sebanyak 82 kasus yang di porkan adalah jenis pina obat farmasi dan sebanyak 82 kasus di selesaikan juga merupakan jenis tindak pidana obat farmasi.

**Tabel 3.20 Jumlah Kecelakaan, Kerugian Material, dan Korban Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

Bulan <i>Month</i>	Jumlah Kecelakaan <i>Number of Accident</i>	Kerugian Material <i>Financial Loss</i>	Kondisi Korban <i>Victim Condition</i>		
			Meninggal <i>Death</i>	Luka Berat <i>Seriously Injured</i>	Luka Ringan <i>Wound</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari/ <i>January</i>	4	151 200 000	1	-	6
Febuari/ <i>February</i>	5	5 200 000	1	1	5

Maret/March	4	5 500 000	3	1	3
April/April	4	26 100 000	3	-	3
Mei/May	2	18 000 000	2	-	-
Juni/June	5	13 000 000	3	2	7
Juli/July	4	7 000 000	-	-	6
Agustus/August	9	33 750 000	3	1	10
September/September	5	10 000 000	1	1	4
Oktober/October	2	3 000 000	1	1	4
November/November	4	5 700 000	2	1	3
Desember/December	2	20 000 000	2	1	-
<b>Jumlah/Total</b>	<b>50</b>	<b>298 450 000</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>51</b>

Sumber: Polisi Resort Hulu Sungai Selatan

Menurut hasil Kecelakaan, Kerugian Material, dan Korban Menurut Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2016 adalah dengan total jumlah 298 581 000 dengan kondisi korban meninggal sebanyak 22 jiwa, luka berat sebanyak 9 jiwa dan luka ringan sebanyak 51 jiwa.

Berdasarkan komposisi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016 tentang Kecelakaan, Kerugian Material, dan Korban Menurut Bulan adalah yang paling banyak berada pada bulan Januari dengan jumlah sekitar 162 200 000, setelah itu bulan Agustus jumlahnya 56 000 000 dan yang terendah dari bulan Februari 532 000 000

#### H. Kemiskinan

Garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai selatan pada tahun 2016 menyentuh angka Rp. 409.235 dengan presentase penduduk miskin sebesar 6,29%.

**Tabel 3.21 Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Gini Rasio di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2010-2016**

<b>Tahun Year</b>	<b>Garis Kemiskinan Poverty Line (Rupiah)</b>	<b>Penduduk Miskin Number of Poor People</b>		<b>Gini Rasio Gini Ratio</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
2010	256 878	16,304	7,66	0,229
2011	279 594	15,761	7,25	0,345
2012	305 283	15,146	6,90	0,295
2013	332 312	14, 836	6,67	0,264
2014	351 691	15,223	6,77	0,269
2015	365 097	14,590	6,45	0,304
2016	409 235	14,420	6,29	...

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas*

Menurut hasil garis kemiskinan, penduduk miskin dan gini rasio di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2010 dimana tingkat garis kemiskinan sebanyak 256.878 dengan penduduk miskin sebanyak 16.304 dan gini rasio masih tidak diketahui.

Berdasarkan komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin dan gini rasio di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2010 dengan angka 256.878, 2011 dengan angka 279.594, 2012 angka 305.283, 2013 angka 332.312, 2014 angka 351.691, 2015 angka 365.097. dengan tingkat gii rasio paling tinggi terdapat pada tahun 2014 sebesar 0,345 persen.

**Tabel 3.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikatornya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2010-2016**

Tahun Year	Angka Harapan Hidup <i>Life Expectancy</i> (tahun)	Harapan Lama Sekolah <i>Expected Years of Schooling</i> (Tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah <i>Mean Years of Schooling</i> (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita <i>Expenditure Per Capita</i> (Ribu Rupiah/Jiwa /Tahun)	IPM <i>HDI</i>	Peringkat IPM <i>HDI Rank</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	62,94	10,42	7,04	10 464	62,80	11
2011	63,16	10,72	7,05	10 696	63,44	10
2012	63,36	11,04	7,05	10 867	64,03	10
2013	63,55	11,35	7,05	11 006	64,59	10
2014	63,64	11,68	7,21	11 077	65,25	10
2015	64,14	11,83	7,67	11 161	66,31	10
2016	65,38	12,02	7,68	11 623	67,52	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Susenas

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikatornya dimana sebanyak 65,38 adalah angka harapan hidup, sebesar 12,02 adalah harapan lama sekolah, sebesar 7,68 adalah rata-rata lama sekolah, sebesar 11.623 adalah pengeluaran per kapita, 67,52 adalah IPM dan sebesar 6 merupakan peringkat IPM. Hal ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikatornya tertinggi terdapat pada tahun 2011 dengan peringkat IPM 11.

**Tabel 3.23 Jual Mobil dan Tenaga Pemadam Kebakaran Menurut Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

	<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Mobil Pemadam Kebakaran Number of Car (Unit)</b>	<b>Tenaga Pemadam Kebakaran Number of Firefighter (Orang)</b>
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1</b>	Padang Batung	-	-
<b>2</b>	Loksado	-	-
<b>3</b>	Telaga Langsat	-	-
<b>4</b>	Angkinang	6	66
<b>5</b>	Kandangan	44	660
<b>6</b>	Sungai Raya	2	68
<b>7</b>	Simpur	1	20
<b>8</b>	Kalumpang	-	-
<b>9</b>	Daha Selatan	12	286
<b>10</b>	Daha Barat	-	-
<b>11</b>	Daha Utara	8	185
	<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>73</b>	<b>1 285</b>

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kab.Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 mengenai Jual Mobil dan Tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 1.358 yang terdiri dari 73 mobil pemadam kebakaran dan 1.285 adalah tenaga pemadam kebakaran.

Berdasarkan komposisi Jual Mobil dan Tenaga Pemadam Kebakaran dimana Mobil kebakaran dan Tenaga Pemadam kebakaran hanya terdapat di beberapa kecamatan seperti kecamatan Angkinang, Kandangan, Sungai raya, Simpur, Daha Selatan dan Daha Utara.

**Tabel 3.24 Jumlah Bencana Alam, Korban, dan Taksiran Kerugiannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016**

<b>Bencana Disaster</b>	<b>Frekuensi Kejadian Frequency</b>	<b>Korban Victim</b>			<b>Taksiran Kerugian Loss Estimating (000 Rp)</b>
		<b>Kepala Keluarga Household</b>	<b>Jiwa Person</b>	<b>Meninggal Death</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Kebakaran <i>Fire</i>	44	58	-	-	3 480 000
Banjir <i>Flood</i>	6	195	-	-	1 925 000
Tanah Longsor <i>Landslide</i>	4	-	-	-	80 000
Angin Punyah <i>Cyclone</i>	22	24	-	-	288 000
Kekeringan <i>Drought</i>	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2016 mengenai Jumlah Bencana Alam, Korban, dan Taksiran Kerugiannya dimana frekuensi kejadian seperti bencana kebakaran sebanyak 44, bencana banjir 6, bencana tanah longsor sebanyak 4 dan anginpuyuh sebanyak 22. Sedangkan dilihat dari korban seperti kepala keluarga yang mengalami bencana kebakaran sebanyak 58, bencana banjir sebanyak 195 dan bencana angin puyuh sebanyak 24 serta untuk korban jiwa dan meninggal tidak ada. Sehingga di taksir kerugian bencana kebarakan sekitar 3.480.000, bencana banjir sekitar 1.925.000, bencana tanah longsor sekitar 80.000 dan angin puyuh sekitar 288.000.

## I. Infrastruktur

### 1. Infrastruktur Jalan Darat

Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi kedalam tiga status yaitu Jalan Negara yang pengelolaannya dibawah Pemerintah Pusat, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Selanjutnya Kondisi jalan kabupaten menurut kecamatan disajikan pada table berikut.

**Tabel 3.25 Infrastruktur Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2016**

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	Padang Batung	46.02	14	29.8	2	91.82
2	Loksadi	23.6	25.25	43.6	61.5	153.95
3	Telaga Langsung	21.95	5	8.5	3	38.45
4	Angkinang	41.48	14.97	15.7	9.8	81.95
5	Kandangan	67.46	9.59	11.25	9.38	97.68
6	Sungai Raya	68.02	12.9	17.65	5.5	104.07
7	Simpur	39.68	15.45	19.9	1.4	76.43
8	Kalumpang	11.97	17.5	29.25	21.5	80.22
9	Daha Selatan	19.98	5.15	15.8	5	45.93
10	Daha Barat	2.5	9.5	19.5	8.3	39.8
11	Daha Utara	16.21	11.95	8.71	3.4	40.27
<b>Hulu Sungai Selatan</b>		<b>358.87</b>	<b>141.26</b>	<b>219.66</b>	<b>130.78</b>	<b>850.57</b>

Sumber: Dinas PU Kab. Hulu Sungai Selatan, 2016

Berdasarkan data diatas, kondisi baik kategori baik untuk status jalan kabupaten yaitu 358,87 Km, kondisi jalan sedang yaitu 141,26 Km, rusak 219,66 Km dan kondisi jalan rusak berat mencapai 130,78 Km.

## **BAB IV**

### **DAERAH RAWAN KONFLIK**

#### **A. Fakta dan Faktor Penyebab Konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antar etnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Terkait dengan kemungkinannya terjadi konflik sosial ditengah masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat digambarkan bahwa konflik dapat dilihat sebagai masalah-masalah sosial, budaya, politik dan ekonomi.

1. Konflik Wilayah Perbatasan, diantaranya antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, antara Desa Sungai

Kupang Kecamatan Kandangan dan Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang

Konflik wilayah perbatasan antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk di dalamnya perebutan wilayah tangkapan ikan dan cara menangkap ikan diantara masyarakat di kedua daerah Kabupaten yang disebabkan faktor ekonomi.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah utara, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru disebelah timur, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar disebelah selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin disebelah barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,94 km<sup>2</sup> atau 180.494 hektar. Dengan jumlah 11 Kecamatan yaitu Kandangan, Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara. menempatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari berbagai konflik yang ada dimasyarakat.

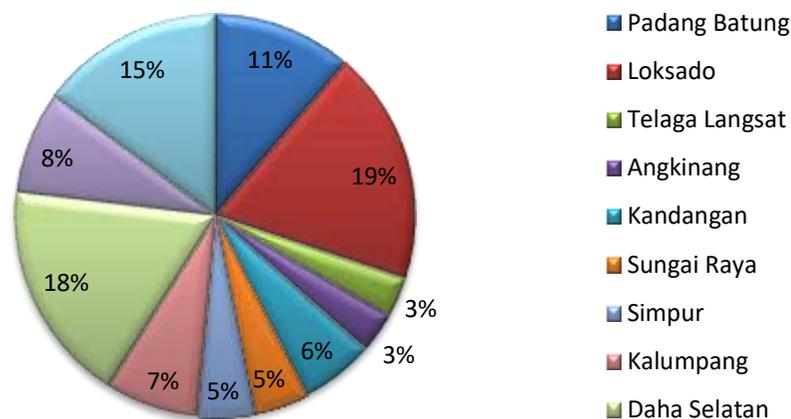
**Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Padang Batung	203,93	11,30
2.	Loksado	338,89	18,78
3.	Telaga Langsat	58,08	3,22
4.	Angkinang	58,40	3,24
5.	Kandangan	106,71	5,91

6.	Sungai Raya	80,96	4,49
7.	Simpur	82,35	4,56
8.	Kalumpang	135,07	7,48
9.	Daha Selatan	322,82	17,89
10.	Daha Barat	149,62	8,29
11.	Daha Utara	268,11	14,85
<b>Hulu Sungai Selatan</b>		<b>1.804,94</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Gambar 4.1 Grafik Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**



Konflik wilayah perbatasan antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi di Danau Bangkau yang termasuk wilayah Kecamatan Kandangan dan sebagian Kecamatan Daha Utara yang permasalahannya terkait dengan pembagian wilayah penangkapan ikan dimana diantara kedua wilayah tersebut merupakan perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sampai saat ini batas Wilayahnya belum jelas. Selain daripada

itu cara penangkapan ikan yang menggunakan alat setrum juga memicu konflik dan merugikan masyarakat yang menggunakan alat menangkap ikan tradisional/ramah lingkungan, tidak bisa mengambil jala dan peralatan menjaring ikan serta maraknya penggunaan senjata api rakitan ( dumdum) juga mengancam keselamatan diri, merusak ekosistem rawa yang kaya potensi ikannya juga mengancam nelayan setempat yang masih menggunakan peralatan tradisional.

Hal ini memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan di tengah masyarakat, mulai dari keresahan menjadi korban kejahatan, produktivitas masyarakat yang tidak optimal, hingga kerugian harta benda lainnya. Konflik terjadi dapat karena persaingan dalam berbagai sektor, khususnya dalam akses sumberdaya alam dan pembagian sektor ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten.

## 2. Sengketa Lahan antara Masyarakat dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar yang Disebabkan Faktor Ekonomi

Sengketa lahan juga menjadi salah satu penyebab konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti lahan kelapa sawit, dimana pembukaan lahan kelapa sawit lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan hal ini menimbulkan sengketa terlebih banyaknya lahan sawit yang dibuka dimana sengketa yang terjadi terkait persoalan pembayaran ganti rudi lahan dan tali asih (Kesbangpol, 2016).

**Tabel 4.6 Luas Panen Tanaman Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (hektar) 2016**

No.	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada
1	Padang Batung	4.774	1.516	743	81	1
2	Loksado	6.512	105	1.039	59	2
3	Telaga Langsat	2.068	180	313	23	-
4	Angkinang	472	325	280	3	-
5	Kandangan	255	1.200	331	1	-
6	Sungai Raya	1.177	2.066	120	3	1
7	Simpur	187	2.147	33	4	-
8	Kalumpang	10	624	20	2	-
9	Daha Selatan	-	-	20	-	-
10	Daha Barat	-	-	50	-	-
11	Daha Utara	-	-	-	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>						
<b>2016</b>		<b>15.455,00</b>	<b>8.163,00</b>	<b>2.949</b>	<b>176,00</b>	<b>4,00</b>
<b>2015</b>		<b>15.373,15</b>	<b>8.352,54</b>	<b>2.985</b>	<b>178,47</b>	<b>5,94</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Tabel 4.7 Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase
Kampung	5.161,18	2,86
Industri	-	-
Pertambanga	-	-
Sawah	44.294,00	24,54
Ladang	8.983,00	4,98
Kebu Campuran	1.744,25	0,97

Kebun Karet	10.906,94	6,04
Padang	53.829,44	29,82
Hutan	55.382,33	30,68
Rawa	192,86	0,11
Tanah Terbuka	-	-
Lain-lain	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>180.494,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Aksi kekerasan yang melibatkan massa terjadi di area perkebunan kelapa sawit milik PT SLS di Desa Bago Tanggul, Kecamatan Kalumpang, Kejadian itu menewaskan seorang pekerja perusahaan tersebut. peristiwa ini terjadi akibat salah paham terkait upaya pembukaan lahan di daerah setempat oleh PT SLS. (Kompas, 2012).

### 3. Konflik Munculnya Aliran-Aliran Keagamaan Yang Menyimpang

Antar Masyarakat Dengan Munculnya Aliran-Aliran Keagamaan Yang Menyimpang Yang Disebabkan Oleh Faktor Agama/ Keyakinan.

No.	Masalah	Lokasi
1	Ajaran Agama yang menyimpang oleh Guru JUHDARI	Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang
2	Ajaran Agama yang menyimpang oleh Guru UDIN	Desa Gumbil Kecamatan Telaga Langsat
3	Setiap hari Jum'at ada kegiatan di rumah JAMBERI (Guru Juhdari)	Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan
4	-	Desa Jelatang Kecamatan Padang Batung

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan MUI

#### 4. Konflik Pembebasan Lahan Untuk Keperluan Proyek Irigasi Amandit

Pembebasan lahan untuk keperluan proyek irigasi Amandit yang nilai ganti ruginya ditolak oleh sebagian masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya transparansi tentang pembebasan lahan dan tidak adanya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, permasalahan ini melibatkan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Sungai Raya.

Konflik irigasi pertanian karena terkendala pembebasan lahan dipicu karena perbedaan harga ganti rugi yang cukup signifikan antara harga yang ditawarkan saat ini, dengan harga sebelumnya. Selain itu, terdapat perbedaan penaksiran harga bagi lahan warga yang memiliki sertifikat dan yang tidak, bagi yang memiliki sertifikat bertambah nilainya 10 persen dari harga. (Antaraneews, 2016)

#### 5. Potensi Konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018

Potensi Konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yang disebabkan faktor politik (*money politic*, sentiment kedaerahan/ fanatisme kedaerahan, kecurangan pemilu, dll);

Hulu Sungai Selatan salah satu Kabupaten dari 115 Kabupaten di seluruh Indonesia yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Juni tahun 2018 mendatang.<sup>1</sup>

Dalam proses pendaftaran calon pemilihan kepala daerah tahun 2018 ada beberapa partai politik tidak mendukung calon petahana, partai politik tersebut melakukan negosiasi dengan calon independen, namun pada tidak mencapai kesepakatan, dimana salah satu penyebab karena beberapa partai politik tersebut meminta posisi Wakil Bupati namun disatu sisi calon independen sudah memiliki wakil.

Calon independen menyatakan mempunyai dukungan 20.000 KTP dari target 35.000 KTP (Banjarmasin Post, 2017). Namun pada perkembangannya KTP yang diumpulkan bermasalah (*fiktif/double*) sehingga ada kemungkinan calon independen tidak bisa mengikuti bursa pilkada di tahun 2018, hal ini menimbulkan kerentanan terjadinya konflik oleh masyarakat pendukung calon independen.

#### 6. Belum adanya Pengakuan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat

Konflik sosial lainnya, masyarakat yang beragam dengan latar belakang budaya, dan agama juga memiliki potensi konflik sosial yang lazimnya disebabkan oleh rendahnya toleransi antarsesama, belum optimalnya upaya kerjasama dan kehidupan bersama antarkelompok etnis di tengah masyarakat.

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>, diakses tanggal 23 November 2017

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Padang Batung	21.734	-	-	-	-	-
2	Loksado	4.967	1.103	-	-	-	3.095
3	Telaga Langsat	11.399	-	-	-	-	-
4	Angkinang	16.970	-	-	-	-	-
5	Kandangan	55.056	162	14	15	7	-
6	Sungai Raya	77.591	13	-	-	-	-
7	Simpur	13.574	-	-	-	-	-
8	Kalumpang	7.390	-	-	-	-	-
9	Daha Selatan	45.783	-	-	-	-	-
10	Daha Barat	2.447	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	32.289	-	-	-	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>							
<b>2016</b>		<b>289.200</b>	<b>1.278</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3.095</b>
<b>2015</b>		<b>244.063</b>	<b>1.385</b>	<b>29</b>	<b>405</b>	<b>6</b>	<b>2.782</b>

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**Tabel 4.5. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**

No.	Kecamatan	Masjid	Langgar	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Khatolik	Pura	Vihara	Balai
1	Padang Batung	23	44	3	-	-	-	-	-
2	Loksado	11	18	2	2	-	-	-	41
3	Telaga Langsat	10	34	-	-	-	-	-	-
4	Angkinang	10	54	7	-	-	-	-	-
5	Kandangan	20	123	7	-	-	-	-	-

6	Sungai Raya	14	88	5	-	-	-	-	-
7	Simpur	11	67	8	-	-	-	-	-
8	Kalumpang	5	30	1	-	-	-	-	-
9	Daha Selatan	8	81	-	-	-	-	-	-
10	Daha Barat	4	24	1	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	10	86	6	-	-	-	-	-
<b>Hulu Sungai Selatan</b>									
	<b>2016</b>	<b>126</b>	<b>649</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>41</b>
	<b>2015</b>	<b>125</b>	<b>659</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>41</b>

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dari data dibawah ini potensi

Belum adanya Pengakuan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat yang disebabkan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah. Kecamatan Loksado merupakan wilayah yang sebagian masyarakatnya mempercayai aliran kepercayaan, potensi konflik yang terjadi karena belum diakui hak-hak masyarakat adat/belum diakomodirnya hak-hak mereka. Saat memasuki jenjang pendidikan misalnya mereka diminta untuk memilih agama tertentu untuk menjadi keyakinan. (Aliansi Masyarakat Adat Nasional HSS, 2017)

7. Potensi konflik sosial disebabkan padatnya jumlah penduduk, kemiskinan, penyandang masalah sosial, kesenjangan pembangunan dan tingginya angka kriminalitas seperti perkelahian, peredaran obat-obatan terlarang yang disebabkan oleh faktor budaya, kurangnya pendidikan dan pengaruh perkembangan IT.

Kurangnya pendidikan yang dimaksud disini adalah masih rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan

hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, salah satunya pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap lingkungan sekitar individu itu tinggal. Semakin tinggi presentase pendidikan yang dimiliki maka lingkungan sekitarnya pun akan otomatis semakin bagus. Dan sebaliknya, apabila pendidikan yang didapat didalam lingkungan tersebut rendah maka lingkungan disekitarpun akan kurang bagus pula.

Sebagai contoh, di Kecamatan tertentu memiliki masyarakat yang pendidikannya kurang pahamal disatu sisi banyak perusahaan yang membangun perkebunan kelapa sawit yang membuka lapangan pekerjaan serta pembukaan lahan yang menimbulkan harga jual tanah di daerah tersebut tinggi, namun disatu sisi dapat kita lihat banyak perusahaan diindonesia yang mencari pekerja yang terpelajar, dengan kurangnya pendidikan seseorang, ia akan sulit mendapatkan pekerjaan sehingga pembukaan perusahaan yang sebelumnya diharapkan dapat menyerap pekerja justru tidak terlalu berpengaruh terhadap meningkatnya penghasilan di daerah tersebut karena kebanyakan hanya menjadi buruh kasar. Selain daripada itu pembukaan lahan yang sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan nilai jual tanah justru dapat menimbulkan konflik dikarenakan tanah masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai sertifikat hak milik. Seperti perbedaan harga jual tanah yang bersertifikat hak milik dengan yang tidak memiliki sertifikat hak milik pada pembangunan irigasi Amandit. Hal ini berakar dari kurangnya pendidikan masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya memiliki sertifikat hak milik dari tanah yang mereka miliki.

Kurangnya Pendidikan berdampak berkurangnya sumber daya manusia akibat minimnya keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh, terjadinya penurunan kestabilan ekonomi dalam negara, kurangnya kesejahteraan, serta menghambat upaya mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pentingnya pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 :

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Jangkauan wilayah dari Ibukota Kabupaten ke beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus mampu disiasati dengan penyediaan infrastruktur fisik dan non fisik yang juga menentukan Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial di Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan mudah dijangkau/ digunakan oleh masyarakat. Sebagai gambaran, Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan:

1. Kandangan-Padang Batung : 7 km
2. Kandangan-Loksado : 42 km
3. Kandangan-Mandala : 14 km
4. Kandangan-Angkinang Selatan : 8 km
5. Kandangan-Sungai Raya : 7 km
6. Kandangan-Simpur : 7 km
7. Kandangan-Kalumpang : 15 km
8. Kandangan-Bayanan : 30 km
9. Kandangan-Bajayau : 42 km
10. Kandangan-Tambak Bitin : 31 km

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan yang mempunyai jarak paling jauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Loksado dan 3 Kecamatan di daerah Daha. Gambaran tersebut dapat kita bandingkan dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini.

**Tabel 4.2. Panjang Jalan Menurut Kematan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (km) 2016**

No.	Kecamatan	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Padang Batung	46,02	14,00	29,80	2,00	91,82
2	Loksado	23,60	25,25	43,60	61,50	153,95
3	Telaga Langsat	21,95	5,00	8,50	3,00	38,45
4	Angkinang	41,46	14,97	15,70	9,80	81,95
5	Kandangan	67,46	9,59	11,25	9,38	97,68
6	Sungai Raya	68,02	12,90	17,65	5,50	104,07
7	Simpur	39,68	15,45	19,90	1,40	76,43
8	Kalumpang	11,97	17,50	29,25	21,50	80,22
9	Daha Selatan	19,98	5,15	15,80	5,00	45,93
10	Daha Barat	2,50	9,50	19,50	8,30	39,80
11	Daha Utara	16,21	11,95	8,71	3,40	40,27
<b>Hulu Sungai Selatan</b>						
<b>2016</b>		<b>358,87</b>	<b>141,26</b>	<b>219,66</b>	<b>130,78</b>	<b>850,57</b>
<b>2015</b>		<b>306,05</b>	<b>178,19</b>	<b>240,46</b>	<b>125,87</b>	<b>850,56</b>
<b>2014</b>		<b>246,45</b>	<b>192,04</b>	<b>268,45</b>	<b>133,62</b>	<b>850,56</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambaran kondisi jalan yang baik dari 4 Kabupaten yang berada paling jauh dengan Ibukota Kabupaten yaitu Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara kondisi jalan yang baik berada dibawah Kecamatan yang dekat seperti Kecamatan Kandangan dan Padang Batung, bahkan Kecamatan Loksado yang jaraknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten memiliki kondisi jalan rusak paling banyak. Kesenjangan

pembangunan seperti ini juga memicu adanya konflik sosial yang ada dimasyarakat.

Penyebab konflik yang ada dimasyarakat juga dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut :

**Tabel 4.3. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Sektor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2016**

No.	Kepolisian Sektor	2014 (%)	2015 (%)	2016(%)
1	Padang Batung	93	80	95,2
2	Loksado	63	66	108,3
3	Telaga Langsat	43	43	87,5
4	Angkinang	70	65	89,3
5	Kandangan	74	70	83,3
6	Sungai Raya	80	39	96,3
7	Simpur	67	45	93,9
8	Kalumpang	100	50	100
9	Daha Selatan	74	60	92,9
10	Daha Barat	-	-	-
11	Daha Utara	100	100	90,9

Sumber : Polisi Resort Hulu Sungai Selatan

Gambaran tentang banyaknya tindak pidana yang dilakukan pada tahun 2014 Kecamatan Kalumpang dan Daha Utara mempunyai persentase tindak pidana terbanyak, tahun 2015 Kecamatan Daha Utara mempunyai persentase tindak pidana terbanyak 2016 dan Kecamatan Loksado mempunyai persentase tindak pidana terbanyak. Dari banyaknya tindak pidana yang dilakukan disuatu daerah membuktikan bahwa tingkat konflik sosial di dalam masyarakat tersebut juga semakin besar artinya ketentraman dan

keamanan di daerah tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilakukan di daerah tersebut.

Tingkat pendidikan yang rendah dan pekerjaan juga dapat menjadi penyebab masyarakat rawan akan konflik.

**Tabel 4.9 Persentase Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,01	0,00	0,98	3,78
Tidak/Belum Tamat SD	20,99	0,00	20,39	19,57
Sekolah Dasar	36,46	26,82	36,19	29,37
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	15,76	10,14	15,60	28,46
Sekolah Menengah Atas Sederajat	17,13	32,60	17,57	16,17
Diploma I/II/III/Akademi	3,46	24,02	4,04	2,41
Universitas	5,20	6,42	5,23	0,24
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Selatan

Kepadatan penduduk di satu wilayah juga dapat dijadikan indikator masyarakat rawan akan konflik. Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 229.889 jiwa yang terdiri atas 114.892 jiwa penduduk laki-laki dan 114.997 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,20 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,91. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 mencapai 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 11 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandangan dengan kepadatan sebesar 471 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 26 jiwa/km<sup>2</sup>.

**REKAPITULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2017 TRIWULAN II**

No	PMKS	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	19	7	26
2	Anak Terlantar	646	710	1356
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	0	0	0
4	Anak Jalanan	0	0	0
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	99	59	158
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	0	0	0
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	0	0	0
8	Lanjut Usia Terlantar	1987	3159	5146
9	Penyandang Disabilitas	661	455	1116

10	Tuna Susila	0	1	1
11	Gelandangan	0	0	0
12	Pengemis	32	10	42
13	Pemulung	10	3	13
14	Kelompok Minoritas	0	0	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	113	1	114
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	215	0	215
18	Korban Trafficking	0	0	0
19	Korban Tindak Kekerasan	0	12	12
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0	0	0
21	Korban Bencana Alam	73	98	171
22	Korban Bencana Sosial	65	79	144
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	2171	2171
24	Fakir Miskin (FM) :	6203	1071	7274
	- Fakir Miskin Pedesaan	5622	1062	6684
	- Fakir Miskin Perkotaan	581	9	590
	- Fakir Miskin Pesisir/Pulau-Pulau Kecil	0	0	0
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2	1	3
26	Komunitas adat Terpencil	0	0	0
Jumlah		16.328	8.908	25.236

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sebagian besar permasalahan sosial tersebut terkonsentrasi di kecamatan Kandangan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui SKPD terkait melakukan berbagai upaya mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut diantaranya melalui direkrutnya tenaga kesejahteraan sosial.

## B. Dampak Konflik

Konflik maupun potensi konflik yang diuraikan di bagian terdahulu menimbulkan dampak sebagai berikut, diantaranya :

- a. Terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat;

Tidak tertib dan amannya masyarakat disini disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan di tengah masyarakat seperti maraknya narkoba, pencurian ataupun pembunuhan hal ini menyebabkan keresahan dimasyarakat, termasuk pula kehadiran penyandang masalah sosial, tingginya angka tindak pidana disuatu daerah berpengaruh besar terhadap keamanan di daerah tersebut. Sesuai dengan pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk saling berkomunikasi dan hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Tentu tindakan yang meresahkan seperti tindak pidana berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan, sehingga mengakibatkan tidak tertib dan kurangnya rasa aman oleh masyarakat.

- b. Perubahan kepribadian pada individu-individu, menjadi mudah curiga, mudah terpancing, dan lain sebagainya;

Konflik yang terjadi akan mempengaruhi kepribadian dari masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Individu-individu yang ada dalam kelompok sosial tertentu akan mengalami perubahan sifat. Biasanya mereka

akan diliputi perasaan marah, curiga, dan membenci orang-orang yang menjadi lawan konfliknya. Terkadang kepribadian seseorang lambat laun akan berubah menjadi seseorang yang diliputi kecemasan. Ia tidak akan merasa tenang karena khawatir jika konflik akan terjadi lagi. Ia diliputi rasa curiga jika kelompok yang dulunya berkonflik dengan mereka kembali menyulut permasalahan.

c. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa.

Perpecahan kelompok merupakan satu bentuk pertentangan yang terjadi antar masyarakat bukan hanya antar Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten yang sama namun juga dengan Kabupaten lain, terlebih lagi konflik yang sering muncul di daerah-daerah perbatasan. Sebagai contoh konflik perebutan wilayah tangkap ikan.

Perpecahan kelompok ini dapat mengakibatkan permusuhan di tengah masyarakat, hilangnya rasa gotong royong dan tolong menolong bahkan mengakibatkan korban jiwa dikarenakan perpecahan kelompok yang diselesaikan dengan adu kekuatan fisik.

Banyaknya kerugian, baik harta benda maupun jiwa, akibat kekerasan yang ditonjolkan dalam penyelesaian suatu konflik.

Cara penyelesaian suatu konflik berpengaruh besar terhadap keadaan masyarakat, penyelesaian konflik dengan kekerasan menimbulkan banyaknya kerugian, baik harta benda maupun jiwa. Faktor utama menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik karena kurangnya

komunikasi yang lancar antar anggota kelompok yang terlibat konflik sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang memperbesar masalah yang terjadi. Perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk menyelesaikan konflik dengan akomodasi. Akomodasi adalah usaha untuk meredakan pertentangan atau konflik agar tercapai stabilitas atau cara menyelesaikan suatu konflik atau pertentangan tanpa mengalahkan atau menghancurkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak merasa kehilangan kepribadiannya.

d. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Kesenjangan pembangunan dapat menimbulkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang dapat menyebabkan mangkirnya masyarakat untuk bayar pajak, ikut serta dalam pemilihan umum, dll.

Kesenjangan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan antar wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak merata, seperti halnya ada Kecamatan yang infrastruktur seperti jalan baik sedangkan disatu Kecamatan lain kondisi jalan masih banyak yang rusak berat, begitupun infratsruktur lainnya.

Implikasi dari kesenjangan tersebut diantaranya adalah lemahnya potensi sumber daya manusia (SDM), terutama di Kecamatan yang jauh dari pusat Ibukota Kabupaten, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya alam di Kecamatan tertentu yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan

penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi dan ketersediaan sarana prasarana, serta infrastruktur lainnya.

Pada akhirnya karena kesenjangan pembangunan tersebut dapat membuat masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintah seperti mangkirnya masyarakat membayar pajak karena disatu sisi pembangunan di daerah tertentu tidak merata sedangkan pajak yang dibayarkan sama. Sampai pada titik dimana masyarakat tidak ikut serta dalam pemilihan umum karena merasa adanya ketimbangan pembangunan padahal mereka punya perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun dipimpin oleh kepala daerah yang sama.

Sehingga kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam masyarakat yang merugikan proses pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan pembangunan pada semua aspek kehidupan secara merata, adil, dan mensejahterahkan rakyat secara menyeluruh.

e. Tingkat kesejahteraan sosial yang rendah;

Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tingkat kesejahteraan sosial yang rendah mengakibatkan kurangnya aspek kehidupan sosial secara merata, adil, dan mensejahterahkan rakyat secara menyeluruh. Dikarenakan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat, tingkat kesejahteraan sosial yang rendah ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tidak meratanya pembangunan, perbedaan wilayah, tidak pidana yang terjadi, ataupun penyebaran jumlah penduduk di suatu Kecamatan. Pengukuran kesejahteraan sosial ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang benar dan tepat sasaran, dan tidak hanya berpatokan pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dari Badan Penelitian dan Statistik, agar dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana Alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pencegahan konflik dilakukan melalui upaya terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat dengan cara
  - a).mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
  - b).menghormati perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat;

- c).menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; d).mengakui persamaan derajat serja persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku,keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; e). mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar keBhineka-tunggal- ikaan; dan/ atau f).menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  3. Meredam potensi konflik; dengan cara : a).melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; b).menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; c). melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik; d). mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat; e). menegakkan hukum tanpa diskriminasi; f). membangun karakter bangsa; g). melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal, dan h).menyelenggarakan musyawarah untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.
  4. Membangun sistem peringatan dini, melalui : a). penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik; b). penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat; c). penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d).peningkatan dan pemanfaatan modal sosial dan e).penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik tersebut, diantaranya:

- a. Penyuluhan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Program dan Kegiatan yang menjembatani permasalahan, keluhan dan kesenjangan yang terjadi seperti “Bupati Menjawab” , program radio *on air* yang dilaksanakan setiap minggu dan langsung dipimpin oleh Bupati dan ditanggapi oleh SKPD terkait; pemberian-pemberian bantuan usaha, keterampilan bagi mereka yang tidak mampu atau jaminan hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas permanen;
- c. Pendekatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat;
- d. dibentuknya berbagai forum seperti :
  - Komunitas Intelijen Daerah dan Tim Teknis Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/ 105/ KUM/ 2016; bertugas :
    - 1) Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan

- 2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah Kabupten Hulu Sungai Selatan.
- Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/ 404/ KUM/2016; bertugas :
    - 1) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
    - 2) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
    - 3) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
    - 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
    - 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.
  - Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2016-2021 melalui Keputusan

Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/405/KUM/2016;  
bertugas :

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - 2) Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/ 125/ KUM/2017 yang beranggotakan : 1).Bupati HSS; 2).Sekretaris Daerah Kabupaten HSS; 3).Kapolres HSS; 4).Dandim 1003 Kandangan; 5).Kejari Kabupaten HSS; 6). Kepala BPB, Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.HSS; 7).Kabag Ops Polres HSS; 8).Kasi Ops Kodim 1003 Kandangan; 9).Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kab HSS; 10).Kepala Dinas Pertanian Kab HSS; 11).Kepala Dinas Perikanan Kab HSS; 12).Kepala Dinas Pendidikan Kab HSS; 13).Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.HSS; 14).Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab HSS; 15).Badan Intelijen Daerah Perwakilan Kab HSS; 16).Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kandangan; 17).Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.HSS; 18).Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kab.HSS; 19).Kabid

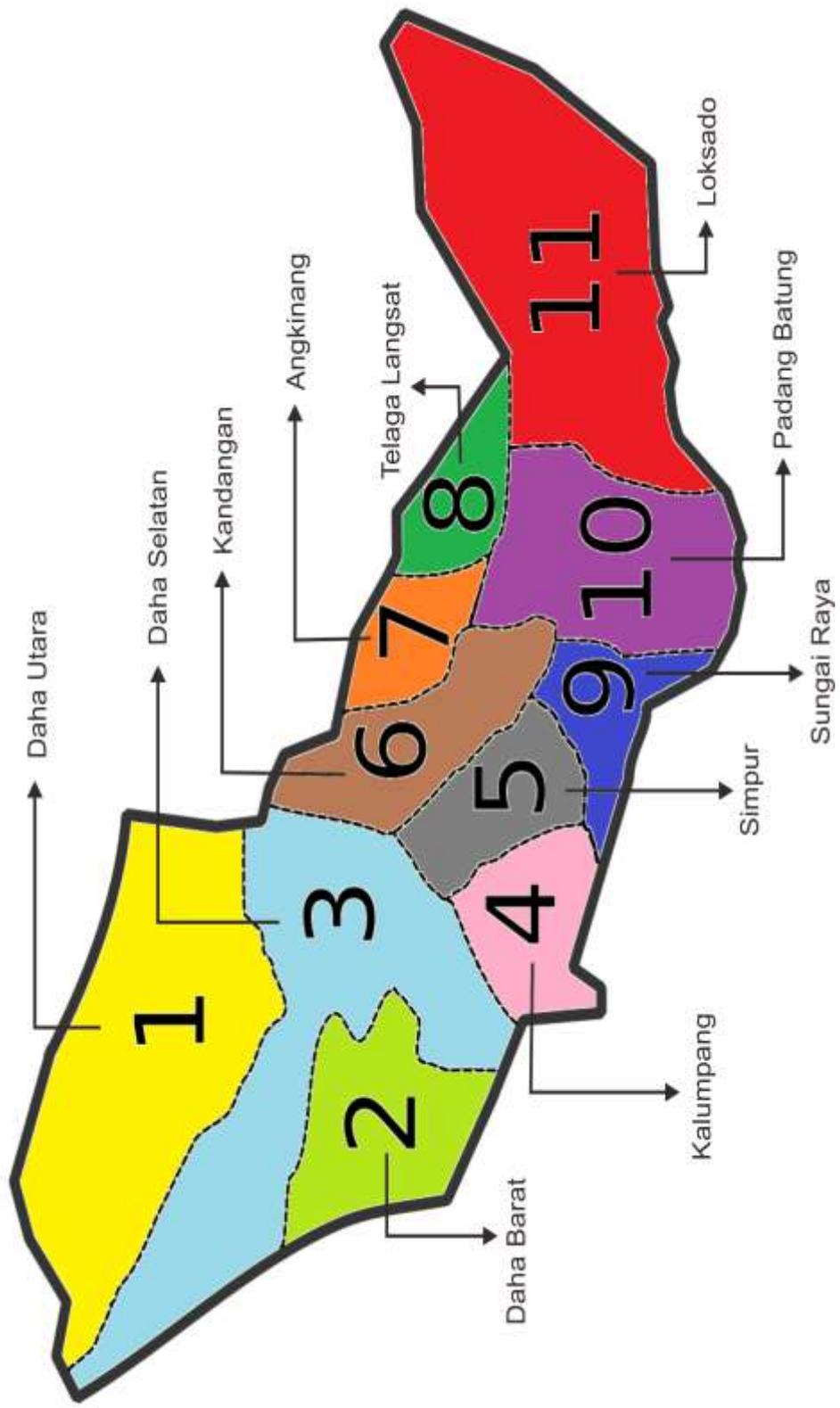
Kesbangpol, BPB-Kesbangpol Kab HSS; 20.Kasubid Kesbang, BPB-Kesbangpol Kab.HSS.

Tugas tim terpadu penanganan konflik adalah :

- 1) Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
- 2) Mengkoordinasi, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
- 3) Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- 4) Melakukan upaya pencegahan melalui sistem pengawasan dini;
- 5) Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- 6) Membantu upaya penanganan pengungsi dan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **C. Deskripsi Wilayah Rawan dan Berpotensi Konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Dari fakta yang terdapat pada pembahasan Bagian A Daerah rawan Konflik terbesar ada di Kecamatan Loksado, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara, dan Kandangan.



## KETERANGAN

### 1 DAHA UTARA

- Konflik wilayah perbatasan antara Kab. HSS dengan Kab. HST
- Perebutan wilayah tangkapan ikan dan cara menangkap ikan
- Potensi konflik sosial disebabkan tingginya angka kriminalitas seperti peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 2 DAHA BARAT

- Potensi konflik sosial disebabkan tingginya angka kriminalitas seperti peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 3 DAHA SELATAN

- Potensi konflik sosial disebabkan tingginya angka kriminalitas seperti peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018
- Konflik wilayah antara Kec. Kalumpang dengan Kec. Daha Selatan

### 4 KALUMPANG

- Sengketa lahan tentang usaha perkebunan kelapa sawit
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018
- Konflik wilayah antara Kec. Kalumpang dengan Kec. Daha Selatan karena akan dibukanya lahan sawit

### 5 SIMPUR

- Potensi konflik sosial disebabkan tingginya angka kriminalitas karena kebiasaan membawa senjata tajam
- Konflik wilayah perbatasan antara Kec. Kalumpang dan Kec. Simpur karena pembukaan lahan sawit
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 6 KANDANGAN

- Konflik wilayah perbatasan antara Kab. HSS dengan Kab. HST
- Perebutan wilayah tangkapan ikan dan cara menangkap ikan
- Konflik munculnya aliran keagamaan yang menyimpang
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018
- potensi konflik karena adanya masalah sosial di masyarakat
- Potensi konflik karena akan dibangun jalur kereta api

### 7 ANGKINANG

- Konflik munculnya aliran keagamaan yang menyimpang
- Potensi konflik karena akan dibangun jalur kereta api
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 8 TELAGA LANGSAT

- Konflik munculnya aliran keagamaan yang menyimpang
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 9 SUNGAI RAYA

- Potensi konflik karena akan dibangun jalur kereta api
- Pembebasan lahan untuk irigasi amandit
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

### 10 PADANG BATUNG

- Konflik munculnya aliran keagamaan yang menyimpang
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018
- Pembebasan lahan untuk irigasi amandit
- Potensi konflik karena kebiasaan membawa senjata tajam

### 11 LOKSADO

- Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat
- kesenjangan pembangunan
- Potensi konflik menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2018

Kecamatan Loksado merupakan merupakan Kecamatan terluas dengan luas wilayah 338,89 km<sup>2</sup>. Meskipun memiliki wilayah terluas namun Kecamatan Loksado memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 26 jiwa/km<sup>2</sup>. Jangkauan wilayah Kecamatan dari Ibukota Kabupaten yang terjangkau jauh yaitu 42 km (Kecamatan yang mempunyai jarak paling jauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Loksado dan 3 Kecamatan di daerah Daha), akses jalan dari satu Kecamatan yang mana jarak kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya terlampau jauh, membuat Kecamatan ini perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan kondisi jalan diwilayahnya namun kenyataan berbanding terbalik justru Kecamatan Loksado yang jaraknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten memiliki kondisi jalan rusak paling banyak. Di Kecamatan Loksado jumlah tempat ibadah agama yang minorita justru lebih banyak daripada tempat ibadah agama mayoritas, selain daripada itu Kecamatan Loksado jika di bandingkan dengan 10 (sepuluh) Kecamatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan masyarakat minoritas yang mana Kecamatan lain mayoritas beragama Islam sedangkan Kecamatan Loksado mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan dan Aliran Kepercayaan sehingga terjadi kesenjangan sosial yang dapat menyebabkan konflik di daerah ini. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana terbanyak di tahun 2016. Kondisi tersebut menempatkan Kecamatan Loksado menjadi wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara, merupakan wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini disebabkan karena ketiga Kecamatan ini memiliki akses paling jauh dari Ibukota Kabupaten bersama dengan Kecamatan Loksado. Ketiga Kecamatan ini juga merupakan daerah rawa yang rawan konflik pada saat kemarau areal rawa mendatangkan berkah bagi masyarakat sekitar, rawa yang kering dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi dan palawija, selain itu rawa juga merupakan tempat hidup ikan air tawar, sehingga membuat wilayah ini melimpah akan hasil tangkapan ikannya, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik perebutan areal tangkap ikan di perairan rawa. Contohnya seperti konflik penangkapan ikan di Danau Bangkau.

Kecamatan Daha Selatan merupakan Kecamatan terluas kedua di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 322,82 km<sup>2</sup> dan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar kedua yaitu 18,6% dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Kecamatan Daha Barat merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas kelima yaitu 149,62 m<sup>2</sup>. Dan Daha Utara merupakan Kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan luas wilayah 268,11 km<sup>2</sup> dan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar kedua yaitu 14,3% dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Daha Utara juga mempunyai persentase tindak pidana terbanyak tahun 2015. Kondisi wilayah rawa, akses yang jauh dari Ibukota Kabupaten, Kepadatan

Penduduk menempatkan Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara menjadi wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kecamatan Kandangan dengan luas wilayah 106,71 km<sup>2</sup> merupakan Kecamatan dengan persentase kepadatan penduduk terbanyak yaitu 21,88% dengan kepadatan sebesar 471 jiwa/km<sup>2</sup> dari jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai Kecamatan yang merupakan Ibukota Kabupaten kepadatan penduduk merupakan problematika utama yang tidak bisa dihindari. Kecamatan dengan rawan konflik agama terbesar bersamaan dengan Kecamatan Loksado, di dua Kecamatan ini memiliki masyarakat dengan agama dan aliran kepercayaan yang beragam. Sebagai daerah yang menjadi pusat dari Pemerintahan menempatkan Kecamatan ini menjadi wilayah rawan dan berpotensi konflik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konflik yang dapat terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain :
  - a. konflik wilayah perbatasan antara Kabupaten HSS dengan Kabupaten HST, termasuk di dalamnya perebutan wilayah tangkapan ikan dan cara menangkap ikan diantara masyarakat di kedua daerah Kabupaten yang disebabkan faktor ekonomi; selain itu ada pula konflik antar desa dalam satu kecamatan, konflik antar desa di dua kecamatan dan konflik antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada
  - b. sengketa lahan antara masyarakat dengan usaha perkebunan Kelapa Sawit skala besar yang disebabkan faktor ekonomi;
  - c. konflik antar masyarakat dengan munculnya aliran-aliran keagamaan yang menyimpang yang disebabkan oleh faktor agama/ keyakinan;
  - d. pembebasan lahan untuk keperluan proyek irigasi Amandit yang nilai ganti ruginya ditolak oleh sebagian masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya transparansi tentang pembebasan

lahan dan tidak adanya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat ;

- e. potensi konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yang disebabkan faktor politik (*money politic*, sentiment kedaerahan/ fanatisme kedaerahan, kecurangan pemilu, dll);
- f. belum adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang disebabkan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah;
- g. potensi konflik sosial disebabkan padatnya jumlah penduduk, kemiskinan, penyandang masalah sosial, kesenjangan pembangunan dan tingginya angka kriminalitas seperti perkelahian, peredaran obat-obatan terlarang, membawa senjata tajam yang disebabkan oleh faktor budaya, kurangnya pendidikan dan pengaruh perkembangan IT

2. Dampak konflik yang mungkin timbul :

- a. Terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Perubahan kepribadian pada individu-individu, menjadi mudah curiga, mudah terpancing, dan lain sebagainya;
- c. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa.
- d. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- e. Tingkat kesejahteraan sosial yang rendah

3. Daerah rawan Konflik yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di hampir seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan

Loksado, Daha Selatan, Daha Barat, dan Daha Utara, dan Kandangan.

## **B. Saran**

1. Perlunya penguatan kelompok masyarakat sipil, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi potensi konflik yang terjadi.
2. Menggunakan pendekatan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik.
3. Optimalisasi pembinaan pasca konflik, koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi konflik, merancang strategi dalam penyelesaian konflik seperti pendidikan kesadaran hukum sejak dini dan nilai-nilai keagamaan.
4. Melengkapi instrument hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi konflik baik berupa peraturan daerah, ASN pelaksana dan sarana prasarana;
5. Penyelesaian persoalan batas wilayah secara terstruktur dan terencana, walaupun belum terjadi konflik, termasuk wacana untuk menetapkan kawasan Bengkau sebagai kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kabupaten Hulu Sungai dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Angkinang dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Daha Selatan dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Kalumpang dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Kandangan dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Loksado dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Simpur dalam Angka*, 2017

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Kecamatan Telaga Langsat dalam Angka*, 2017

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Pengeluaran, 2012-2016*
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Hari Peorwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2000.
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008,
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002.
- Luthan, F., *Organizational Behavior*, New York: McGraw Hill Book Company, 1985.
- M. Mukhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai Teori, Strategi, dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang, : Penerbit WMC, 2007.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2007.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Nurhadiantomo, *Hukum Reintegrasi Sosial Konflik-Konflik Sosial Pri-Non Pri dan Hukum Keadilan Sosial*, Surakarta : Penerbit Muhammadiyah University Press, 2004.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001.
- Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta:universitas terbuka 2004.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Sultan Takdir Alisjahbana, *Antropologi Baru*, Jakarta : Penerbit Dian Rakyat, 1986.
- Wahyudi, *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2006.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/105/KUM/2016 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah dan Tim Teknis Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/ 404/ KUM/ 2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2016-2021

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/ 405/KUM/ 2016 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum kerukunan Umat Beragama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2016-2021

Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/125/KUM/2017  
tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**INTERNET**

<https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>, diakses tanggal 23 November 2017